



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 98 TAHUN 2024  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, terdapat 15 (lima belas) Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian kembali tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nr 16 Dan Nr 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Daerah adalah Kota Probolinggo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
6. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan informasi yang meliputi :
  - a. hasil pengukuran kinerja; dan
  - b. identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penetapan indikator kinerja utama adalah untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi.

#### Pasal 3

Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 219);
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2);
3. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 49),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 98 TAHUN 2024  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA  
PROBOLINGGO DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi : Pemerintah Kota Probolinggo

Tujuan : 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah  
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia  
3. Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan  
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup  
5. Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis Digital

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	URUSAN PENGAMPU
1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_{(t)} - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$ <p><b>Keterangan :</b>  t = tahun pengamatan (tahun ini)  t-1 = satu tahun sebelumnya</p>	Penanaman Modal Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Pariwisata Pertanian Perikanan Pangan
2	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sebuah indikator kesejahteraan yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Rumus penghitungan IPM sebagai berikut. $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$	Pendidikan Perpustakaan Kepemudaan dan Olahraga Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan	Persentase Penduduk Miskin	Persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah total penduduk. $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$	Sosial Pemberdayaan Masyarakat Tenaga Kerja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	URUSAN PENGAMPU
			<p><b>Keterangan :</b>  <math>\alpha = 0</math>  <math>z</math> = garis kemiskinan.  <math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<math>i=1, 2, 3, \dots, q</math>), <math>y_i &lt; z</math>  <math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.  <math>n</math> = jumlah penduduk.</p>	<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <hr/> <p>Trantibum</p> <hr/> <p>Kesatuan Bangsa dan Politik</p>
		Tingkat Pengangguran Terbuka	<p><b><math>TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran} \times 100\%}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}</math></b></p> <p><b>Keterangan :</b>  TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja</p>	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	URUSAN PENGAMPU
		Indeks Gini	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ <p><b>Keterangan :</b>  <i>f<sub>i</sub></i> = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke <i>i</i>. <i>Y<sub>i</sub></i> = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke <i>i</i>. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja</p>	
4	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Indeks Infrastruktur	<p>Indeks Infrastruktur dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik dari Indeks Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur, yakni sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Infrastruktur} = \frac{\text{Indeks Ketersediaan} + \text{Indeks Kualitas}}{2}$ <p><b>Keterangan :</b>  <i>Indeks Ketersediaan meliputi :</i>  (Fasilitas Jalan, Angkutan, Air Limbah,</p>	Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan Perhubungan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	URUSAN PENGAMPU
			Irigasi drainase, Komunikasi informatika, fasilitas publik, IMB) <i>Indeks Kualitas meliputi :</i> (Jaringan Jalan, Air Bersih, Irigasi drainase, Persampahan, Pertanahan)	
		Persentase Penurunan Emisi GRK	<p><b>Persentase Penurunan Emisi GRK =</b>  <b>Persentase PEy-1 (+) Persentase PEy</b></p> $\text{Persentase PEy} = \frac{PEy}{EBy} \times 100\%$ $PEy = EBy - EPy$ <p><b>Keterangan :</b>  PEy = Penurunan emisi oleh aksi mitigasi pada tahun y (ton CO2)  EBy = Emisi Baseline pada tahun y (ton CO2)  EPy = Emisi Aksi Mitigasi pada tahun y (ton CO2)</p>	Lingkungan Hidup Trantibum Sub Bencana
5	Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis Digital	Indeks Reformasi Birokrasi	<p><b>Indeks RB = Nilai RB General+Nilai RB Tematik</b></p> <p><b>Keterangan :</b>  Reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada <b>RB General</b> lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi</p>	Unsur Staff (Setda) Perencanaan Seluruh perangkat daerah Kearsipan Keuangan Pengawasan Komunikasi dan Informatika Statistika Persandian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	URUSAN PENGAMPU
			<p>kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang.</p> <p>Adapun Evaluasi <b>RB Tematik</b> lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan</p>	<p>Kepegawaian</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>Unsur Kewilayahan</p> <p>Penanaman Modal</p> <p>Kesehatan</p> <p>Unsur Staff</p>

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Sekretariat Daerah
Tujuan	: 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Nilai SAKIP 2. Indeks Pelayanan Publik
Tugas	: Membantu Wali Kota dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Serta Pelayanan Administratif
Fungsi	: 1. Pengordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah 2. Pengordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah 4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah 5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang difasilitasi sesuai ketentuan	$\frac{\text{Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang difasilitasi}}{\text{Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan sesuai ketentuan}} \times 100$	Laporan fasilitasi kebijakan bidang perekonomian	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	$ITKP = \frac{(W_{Transparansi} \times IK_{Transparansi}) + (W_{Efisiensi} \times IK_{Efisiensi}) + (W_{Akuntabilitas} \times IK_{Akuntabilitas}) + (W_{Partisipasi} \times IK_{Partisipasi}) + (W_{Kualitas Hasil} \times IK_{Kualitas Hasil})}{W_{Total}}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>IK_{Transparansi}</math>: Indeks Transparansi Pengadaan (ketersediaan informasi pengadaan untuk publik).</li> <li>• <math>IK_{Efisiensi}</math>: Indeks Efisiensi Pengadaan (waktu, biaya, dan sumber daya yang digunakan dalam pengadaan).</li> <li>• <math>IK_{Akuntabilitas}</math>: Indeks Akuntabilitas Pengadaan (kepatuhan terhadap aturan, pengawasan, dan audit).</li> <li>• <math>IK_{Partisipasi}</math>: Indeks Partisipasi (lingkat keterlibatan pihak terkait dalam proses pengadaan, baik dari sektor publik maupun swasta).</li> <li>• <math>IK_{Kualitas Hasil}</math>: Indeks Kualitas Hasil (kualitas barang/jasa yang dihasilkan melalui proses pengadaan).</li> <li>• <math>W_{Transparansi}, W_{Efisiensi}, W_{Akuntabilitas}, W_{Partisipasi}, W_{Kualitas Hasil}</math>: Bobot masing-masing dimensi, yang disesuaikan dengan prioritas atau kebijakan pengadaan.</li> <li>• <math>W_{Total}</math>: Total bobot seluruh dimensi, biasanya <math>W_{Total} = 1.0</math>.</li> </ul>	Website SIRUP/SIUKP BJ	Kepala Bagian PBJ
		Nilai LPPD	Nilai LPPD  <b>Keterangan :</b> Hasil Evaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat	Keputusan Mendagri tentang Hasil Evaluasi LPPD	Kepala Bagian Pemerintahan

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Kebijakan Bidang Pkesejahteraan Rakyat yang difasilitasi sesuai ketentuan	$\frac{\text{Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi}}{\text{Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan}} \times 100$	Laporan fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Indeks Reformasi Hukum	Indek Reformasi Hukum  <b>Keterangan :</b> Hasil instrumen pengukuran reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional	Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Hasil Penilaian IRH	Kepala Bagian Hukum
		Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP  <b>Keterangan :</b> Hasil Evaluasi Akuntabilitas Perangkat Daerah terhadap Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Organisasi
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat  <b>Keterangan :</b> Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo Terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	Laporan Hasil SKM Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Prokopim

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
Indikator	: Indeks Pelayanan Publik
Tujuan	Nilai SAKIP
Tugas	: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
Fungsi	: 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD sesuai dengan Fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat  <b>Keterangan :</b> Hasil Survey Kepuasan anggota DPRD Kota Probolinggo Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo	Laporan SKM	Sekretaris DPRD
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada	Nilai SAKIP pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris DPRD

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- Tujuan : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
- Indikator : 1. Nilai SAKIP
- Tujuan : 2. Indeks Inovasi Daerah
- Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah
- Fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;  
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;  
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;  
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas baik	$\frac{\text{Jumlah PD dengan dokumen kualitas baik}}{\text{Jumlah semua PD}} \times 100$ <p>Kriteria berkualitas baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra selaras dengan RPJMD</li> <li>2. Renja n+1 selaras dengan RKPD n+1</li> <li>3. Renja P-APBD selaras dengan RKPD Perubahan</li> </ol>	Laporan Monev	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;</li> <li>2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;</li> <li>3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;</li> <li>4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.</li> </ol>
2	Meningkatnya Kualitas Riset	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah hasil riset (Laporan Akhir, Jurnal, dan Policy Brief) yang dimanfaatkan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah Total Hasil Riset ( N-1)}} \times 100 \%$	Dokumen hasil riset, policy brief, dan jurnal	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
		Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah terakreditasi Nasional	Dokumen hasil riset dan jurnal ilmiah	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Presentase Nilai Inovasi Daerah yang matang	$\frac{\text{Total Inovasi Daerah yang Matang}}{\text{Jumlah Total Inovasi Daerah}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Inovasi Daerah yang matang adalah skor kematangan diatas <math>\geq 70</math></p>	SK Kemendagri mengenai Indeks Inovasi Daerah	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Bappedalitbang	Nilai SAKIP pada Bappedalitbang	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
- Indikator Tujuan : Opini BPK terhadap LKPD
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Keuangan  
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Keuangan  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Keuangan  
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Keuangan; dan  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{PAD \text{ Tahun } (n) - PAD \text{ Tahun } (n-1)}{PAD (n)} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>a PAD Tahun (n) = Pendapatan Asli Daerah Tahun berjalan</p> <p>b PAD Tahun (n-1) = Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya</p> <p>* Menggunakan realisasi PAD</p>	LRA	Kabid Pendapatan Kabid PBB BPHTB
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase PD dengan Realisasi di atas 90%	$\frac{Jumlah \text{ PD dengan Realisasi Belanja diatas } 90\%}{Jumlah \text{ PD}} \times 100\%$	LRA	Kabid Anggaran Kabid Perben dan Kasda
3.		Persentase PD dengan LKPD yang sesuai ketentuan	$\frac{Jumlah \text{ PD yang LKPD nya sesuai ketentuan}}{Jumlah \text{ PD}} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>* Yang dimaksud LKPD sesuai ketentuan adalah LKPD telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Kebijakan Akuntansi</p>	LK SKPD	Kabid Akuntansi dan Pelaporan

4.		Persentase PD yang memiliki kevalidan data BMD	$\frac{\text{Jumlah PD yang memiliki kevalidan data BMD}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>* Yang dimaksud PD yang memiliki kevalidan data BMD adalah PD yg telah memiliki kesamaan data dengan melaksanakan Rekonsiliasi (antara realisasi LRA dengan Pencatatan BMD )</p>	BA Rekon Data BMD Tahun berjalan	Kabid BMD
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP pada BPPKAD	Nilai SAKIP pada BPPKAD	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

<b>Instansi</b>	: Inspektorat Kota Probolinggo
<b>Tujuan</b>	: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
<b>Indikator Tujuan</b>	: Level Maturitas SPIP
<b>Tugas</b>	: Membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh Perangkat Daerah
<b>Fungsi</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;</li><li>2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</li><li>3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;</li><li>4. penyusunan laporan hasil pengawasan;</li><li>5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;</li><li>6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;</li><li>7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan</li><li>8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi</li></ol>

No	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo	Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	$f(x) = \frac{\Sigma \text{ PD yang Memperoleh Nilai SAKIP Min A}}{\Sigma \text{ seluruh PD}} \times 100\%$	Dokumen laporan hasil evaluasi SAKIP	- Inspektur Pembantu I - Inspektur Pembantu II - Inspektur Pembantu III
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	$f(x) = \frac{\Sigma \text{ Temuan yang Ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi}}{\Sigma \text{ seluruh Temuan}} \times 100\%$	- LHP APIP internal dan external - Pemantauan TLHP	- Inspektur Pembantu I - Inspektur Pembantu II - Inspektur Pembantu III
		Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	$f(x) = \frac{\Sigma \text{ penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan}}{\Sigma \text{ penanganan kasus / pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	- Dokumen Pengaduan - Dokumen LHP Pengaduan/Kasus	Inspektur Pembantu IV
3.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP	$f(x) = \frac{\Sigma \text{ PD yang melakukan penilaian}}{\Sigma \text{ seluruh PD}} \times 100\%$	- Dokumen hasil penilaian maturitas SPIP	- Inspektur Pembantu I - Inspektur Pembantu II - Inspektur Pembantu III - Inspektur Pembantu IV
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Inspektorat	Nilai SAKIP pada Inpektorat	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
- Indikator Tujuan : Indeks Sistem Merit
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;  
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;  
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan  
5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 =$ $W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 =$ $W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 =$ $W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 =$ $W_{4m} * R_{4m}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</li> <li>• SIMPEG</li> <li>• SAPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Formasi, Informasi dan Mutasi Pegawai</li> <li>• Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai</li> </ul>

			<p><b>Keterangan:</b></p> <p>IP= Indeks Profesionalisme</p> <p>IP<sub>i</sub>= Indeks Profesionalisme ke-i</p> <p>IP<sub>1</sub>= Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP<sub>2</sub>= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p>IP<sub>3</sub>= Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p>IP<sub>4</sub>= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p><math>W_{1j} * R_{1j}</math> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j</p> <p><math>W_{2k} * R_{2k}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k</p> <p><math>W_{3l} * R_{3l}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l</p> <p><math>W_{4m} * R_{4m}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p>		
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada BKPSDM	Nilai SAKIP pada BKPSDM	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator Tujuan	: Persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban
Tugas	: Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li><li>5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;</li><li>6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik Kota;</li><li>7. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya peran serta orkemas dan partisipasi politik masyarakat	Persentase Orkemas yang aktif	$\frac{\text{Jumlah orkemas yang aktif}}{\text{Jumlah total orkemas yang terdata}} \times 100\%$	Laporan hasil kegiatan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Umum	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah keseluruhan pemilih}} \times 100\%$	Laporan Monev Pemilu	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta mengantisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat.	Persentase Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	$\frac{\text{Potensi konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Potensi konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$	Laporan Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Probolinggo	Bidang Kesatuan Bangsa

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Bakesbangpol	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- Instansi** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota probolinggo
- Tujuan** : Meningkatnya Mitigasi, Adaptasi dan Ketahanan terhadap Bencana
- Indikator Tujuan** : Indeks Resiko Bencana
- Tugas** :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
  2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Fungsi** :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
----	----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------	------------------

	<b>OUTCOME</b>				
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	<p>Rumus Umum Indeks Ketahanan Daerah (IKD):</p> $IKD = \frac{(W_{Bencana} \times IK_{Bencana}) + (W_{Ekonomi} \times IK_{Ekonomi}) + (W_{Sosial} \times IK_{Sosial}) + (W_{Lingkungan} \times IK_{Lingkungan})}{W_{total}}$	Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Perihal Penyampaian Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab / Kota Provinsi Jawa Timur	1. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kasi Kedaruratan dan Logistik 3. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada BPBD	Nilai SAKIP pada BPBD	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja
- Tujuan : 1. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum; dan  
2. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana
- Indikator Tujuan : 1. Persentase Penurunan Kasus ketentraman dan Ketertiban  
2. Indeks Resiko Bencana
- Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat  
2. Pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,  
4. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Probolinggo sesuai dengan tugas dan fungsinya

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks N-1 x Tingkat pertumbuhan kasus trantibum + Indeks N-1	Laporan Kegiatan 1 data trantibum	Satpol PP
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah  ----- x 100%  Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan 1 data damkar	Damkar
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Satpol PP	Nilai SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Tujuan	:1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Kesehatan; 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
Indikator Tujuan	:1. Indeks Kesehatan; 2. Indeks Kepuasan Masyarakat, dan 3. Nilai SAKIP
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Fungsi	:1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Perhitungan dari BPS  <b>Keterangan :</b> UHH adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun	BPS	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Kesmas, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
2.	Meningkatnya Keluarga Berkualitas dan Pengendalian Penduduk yang Seimbang	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$  <b>Keterangan :</b> Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) ASFR <sub>i</sub> (Angka Kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur i) i = 1 : Kelompok umur 20-24 tahun ,..... dan i = 7 untuk kelompok umur 45-49 tahun	Laporan <a href="https://portalpk.bkkbn.go.id/">https://portalpk.bkkbn.go.id/</a>	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	(IKM RSUD dr. Mohammad Saleh + IKM RSUD Ar Rozy + IKM Puskesmas + IKM Laboratorium Kesehatan Daerah)  <hr/> 4	Survei Kepuasan Masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Direktur RSUD dr. Mohammad Saleh, Direktur RSUD Ar Rozy, Kepala 6 Puskesmas dan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinkes PPKB	Nilai SAKIP pada Dinkes PPKB	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris
----	--	---	------------------------------	--	------------

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan	:	1. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial masyarakat; dan 2. Meningkatnya keberdayaan dan kesetaraan gender
Indikator Tujuan	:	1. Persentase PMKS; dan 2. Indeks Pembangunan Gender
Tugas	:	Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Fungsi	:	1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Sosial, PPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak ; dan 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{jumlah PMKS yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	Dokumen Hasil Verifikasi dan Validasi pada Dinsos PPPA	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
2.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan kelurahan yang aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakatan kelurahan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Kriteria Lembaga Aktif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mempunyai ketetapan/ struktur organisasi;</li> <li>b) Mempunyai penanggung jawab;</li> <li>c) Terlaksananya program kegiatan (minimal 75 %).</li> </ul>	Laporan hasil fasilitasi Pembinaan	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat
3.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Hasil Evaluasi Pengarustamaan Gender	Dokumen Hasil Evaluasi Pengarusutamaan Gender oleh Kementerian PPPA	Bidang Pemberdayaan Perempuan
4.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan}}{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan melalui UPTD PPA}} \times 100 \%$	Data penanganan kasus UPTD PPA	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang sudah ditangani di Tahun n</li> <li>2. Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi tanggung jawab UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk ditangani</li> </ol>		
		Peringkat Kota Layak Anak	Peringkat Hasil Penilaian Indikator Kota Layak Anak	Dokumen Penilaian Kota Layak Anak oleh Kementerian PPPA	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinsos PPPA	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Probolinggo
Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li><li>2. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah</li></ol>
Indikator Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase Prestasi Olahraga dan Kepemudaan dan Yang Dicapai</li><li>2. Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD</li></ol>
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. perumusan kebijakan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;</li><li>2. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;</li><li>3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;</li><li>4. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan</li><li>5. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olah Raga.	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga Yang Dicapai	$\sum$ Prestasi Kepemudaan dan Cabang Olahraga Yang Diraih Seluruh Ajang Prestasi Kepemudaan dan Cabor Yang Diikuti	X 100%	Laporan Data	Bidang Pemuda dan Olah Raga
2.	Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	$\sum$ Angka Kunjungan Wisatawan Ke Kota Probolinggo pada tahun N - $\sum$ <u>Angka Kunjungan Wisatawan Ke Kota Probolinggo pada tahun N-1</u> $\sum$ Angka Kunjungan Wisatawan Ke Kota Probolinggo pada tahun N-1	X 100%	Laporan Data	Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Promosi Pariwisata
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dispopar	Nilai SAKIP pada Dispopar		Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan	: Meningkatkan Pemenuhan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dengan Penguatan Karakter Nilai-Nilai Budaya Daerah
Indikator Tujuan	: Indeks Pendidikan
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{Bobot Mutu (20\%)} + \text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{Bobot Penerima layanan (80\%)}</math> </p> <p>Keterangan : perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 195/M/2023 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan</p>	Dapodik, Rapor Pendidikan Daerah Kemendikbud Ristek	<p>-Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar,</p> <p>-Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal,</p> <p>-Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Sekretaris</p>
2	Meningkatkan Daya Saing Kebudayaan Lokal	Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah	$\frac{\text{Jumlah Kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah}}{\text{Jumlah seluruh Kebudayaan Daerah}} \times 100\%$	Dapobud	Kepala Bidang Kebudayaan
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Disdikbud	Nilai SAKIP pada Disdikbud	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Perhubungan
Tujuan	: Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan
Indikator Tujuan	: Prosentase Pemerataan Infrastruktur Perhubungan Berkualitas Baik
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perhubungan</li><li>2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perhubungan</li><li>3. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah di Bidang Perhubungan</li><li>4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah di Bidang Perhubungan</li><li>5. Pelaksanaan Fungsi Dinas Lain Yang Diberikan Oleh Wali Kota Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya</li></ol>

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Tersedia di Kota Probolinggo	$f(x) = \frac{\Sigma \text{Perlengkapan Jalan yang tersedia}}{\Sigma \text{Kebutuhan Perlengkapan Jalan}} \times 100\%$ <p><b>Dengan :</b>  <math>f(x)</math>: Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan</p> <p><b>Perlengkapan Jalan meliputi:</b>            Persentase Rambu Lalu Lintas            Persentase Cermin Tikungan            Persentase Alat Penerangan Jalan            Persentase Marka Jalan</p>	Data Perlengkapan Jalan	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sie Rekayasa Lalu Lintas dan Bidang Pengembangan Transportasi, Sie Pengelolaan Transportasi Elektrikal
		Rasio Kejadian Kecelakaan di Perlintasan sebidang Kereta Api	$f(x) = \frac{\Sigma \text{Rasio Kejadian Kecelakaan di Perlintasan sebidang Kereta Api berpaling pintu}}{\Sigma \text{Jumlah Perlintasan Kereta Api di Perlintasan Sebidang berpaling pintu}} \times 100\%$ <p><b>Dengan :</b>  <math>f(x)</math>: Persentase Perlintasan Kereta Api sebidang berpaling pintu</p>	Data Perlintasan Kereta Api Berpaling Pintu	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sie Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional
2	Meningkatnya	Persentase		Data Pelayanan	Unit Pelayanan

	Kualitas Sarana Transportasi Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan	Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	$f(x) = \frac{\Sigma \text{Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala}}{\Sigma \text{Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji}} \times 100\%$ <p><b>Dengan :</b>  <math>f(x)</math>: Persentase Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan laik jalan</p>	Pengujian Kendaraan Bermotor	Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dishub	Nilai SAKIP pada Dishub	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas
Indikator Tujuan	: Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;</li><li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;</li><li>4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan</li><li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Sistem Elektronik yang terintegrasi	Persentase Sistem Elektronik yang terintegrasi	$f(x) = \frac{\sum \text{Sistem Elektronik yang terintegrasi}}{\sum \text{Sistem Elektronik}} \times 100\%$ <p><i>Penjelasan :</i> Sistem Elektronik yang terintegrasi dengan data center dan memanfaatkan domain go.id</p>	Laporan Register Sistem Elektronik	Kepala Bidang Layanan e-Goverment dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik pada Badan Publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	$f(x) = \frac{\sum \text{Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik}}{\sum \text{Badan Publik}} \times 100\%$ <p><i>Penjelasan :</i> Badan Publik mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022, yang dalam hal ini adalah perangkat daerah dan lembaga/unit teknis dibawahnya.</p>	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik
3.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas	$f(x) = \frac{\sum \text{Data statistik sektoral yang berkualitas}}{\sum \text{Data statistik sektoral}} \times 100\%$ <p><i>Penjelasan :</i></p>	Laporan hasil evaluasi daftar data	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik

			Data Statistik sektoral yang berkualitas adalah data yang memenuhi prinsip Satu Data berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.		
4.	Meningkatnya Manajemen Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	$f(x) = \frac{\sum \text{Nilai per Area Keamanan Informasi} \times 100\%}{\sum \text{Area Penilaian}}$ <p>Penjelasan : Indeks KAMI mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah daerah, dengan menilai 6 (enam) area pengamanan informasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata kelola keamanan informasi</li> <li>2. Pengelolaan resiko keamanan informasi</li> <li>3. Kerangka kerja keamanan informasi</li> <li>4. Pengelolaan aset informasi</li> <li>5. Teknologi dan keamanan informasi</li> <li>6. Pelindungan Data Pribadi</li> </ol>	Laporan Penilaian Indeks KAMI	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kominfo	Hasil penilaian SAKIP pada Dinas Kominfo	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo  
 Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK  
 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif  
 Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik  
 Nilai SAKIP  
 Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  
 Fungsi : 1. perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  
 2. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  
 4. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
----	------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------	---------------------

1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk memiliki KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el}} \times 100\%$ <p><b>Keterangan :</b>          Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el = jumlah penduduk usia 17 Th ke atas/ telah menikah yang memiliki KTP-el          jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el = jumlah penduduk usia 17 tahun keatas/telah menikah</p>	Laporan Cakupan Pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil	Kabid Pendaftaran Penduduk
		Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$	Laporan Cakupan Pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil	Kabid Pencatatan Sipil
2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penyajian Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid	$\frac{\text{Jumlah data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid}}{\text{Jumlah data kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$ <p><b>Keterangan :</b>          Data Kependudukan Berupa data agregat meliputi Jumlah Penduduk (berdasar Jenis kelamin, Usia, Agama, Jenis pekerjaan, Pendidikan , Kepemilikan KTP, Akta)</p>	Laporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

		Persentase Permintaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$ <p><b>Keterangan :</b> Data Kependudukan Berupa data agregat meliputi Jumlah Penduduk (berdasar Jenis kelamin, Usia, Agama, Jenis pekerjaan, Pendidikan , Kepemilikan KTP, Akta)</p>	Dokumen permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dispendukcapil	Nilai SAKIP pada Dispendukcapil	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo
Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Pemenuhan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan</li><li>2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif</li></ol>
Indikator Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Pendidikan</li><li>2. Nilai SAKIP</li></ol>
Tugas	: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan</li><li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan</li><li>4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan</li><li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya</li></ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Tahun (n)} - \text{Jumlah Pengunjung Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Pengunjung Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Laporan data	Kepala Bidang : ➤ Perpustakaan ➤ Pembinaan dan Pemasarakatan Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Peningkatan Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku Tahun (n)} - \text{Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Laporan data	Kepala Bidang : ➤ Kearsipan ➤ Pembinaan dan Pemasarakatan Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Disperpusip	Nilai SAKIP pada Disperpusip	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi** : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
- Tujuan** : 1. Meningkatkan Produktifitas Sektor Pertanian  
2. Meningkatkan Produksi Sektor Perikanan;  
3. Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Daerah;  
4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
- Indikator Tujuan** : 1. NTP (Nilai Tukar Petani)  
2. NTN (Nilai Tukar Nelayan)  
3. Indeks Ketahanan Pangan  
4. Nilai SAKIP
- Tugas** : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan
- Fungsi** : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;  
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	$\frac{\text{Produktivitas Pertanian Tahun } n - \text{Produktivitas Pertanian Tahun } (n-1)}{\text{Produktivitas Pertanian Tahun } (n-1)} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) Produktivitas Pertanian Tahun n = Produktivitas Pertanian Tahun Berjalan (Kuintal/Hektar)</p> <p>b) Produktivitas Pertanian Tahun (n-1) = Produktivitas Pertanian Tahun Sebelumnya (Kuintal/Hektar)</p> <p>c) Produktivitas Pertanian adalah suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman</p>	Laporan Hasil Survey Ubinan Komoditas Pertanian	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian	$\frac{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun } n - \text{Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun } (n-1)}{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun } (n-1)} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>a) Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun n = Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun Berjalan (Rp./Kg)</p> <p>b) Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun (n-1) = Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Tahun Sebelumnya (Rp./Kg)</p> <p>c) Nilai tambah produk hasil pertanian adalah selisih nilai produk hasil pertanian yang telah melalui proses pengolahan dengan produk hasil pertanian segar</p>	Laporan Hasil Survey Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian kepada Pelaku Usaha	- Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan -Kepala Bidang Peternakan

		$\frac{\text{Jumlah Kasus PHMS pada tahun } (n-1) - \text{Jumlah Kasus PHMS pada tahun } n}{\text{Jumlah Kasus PHMS pada tahun } (n-1)} \times 100$		
	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis	<p>Keterangan :</p> <p>a) Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun n = Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun berjalan (ekor)</p> <p>b) Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun (n-1) = Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis pada tahun sebelumnya (ekor)</p> <p>c) PHMS = Penyakit Hewan Menular Strategis</p>	Laporan iSIKHNAS (Integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional/Sistem Kesehatan Hewan Nasional Terpadu)	Kepala Bidang Peternakan
2	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	$\frac{\text{Produksi Perikanan Tahun } n - \text{Produksi Perikanan Tahun } (n-1)}{\text{Produksi Perikanan Tahun } (n-1)} \times 100$		
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	<p>Keterangan :</p> <p>a) Produksi Perikanan Tahun n = Produksi Perikanan tangkap dan Produksi Perikanan budidaya Tahun Berjalan (ton)</p> <p>b) Produksi Perikanan Tahun (n-1) = Produksi Perikanan tangkap dan Produksi Perikanan budidaya Tahun Sebelumnya (ton)</p> <p>c) Produksi Perikanan adalah suatu nilai yang menunjukkan seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dalam kurun waktu tertentu</p>	Laporan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	- Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan - Kepala Bidang Perikanan Budidaya
	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	$\frac{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun } n - \text{Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun } (n-1)}{\text{Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun } (n-1)} \times 100$		
	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	<p>Keterangan :</p> <p>a) Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun n = Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun Berjalan (Rp./Kg)</p> <p>b) Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun (n-1) = Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya (Rp./Kg)</p> <p>c) Nilai tambah produk hasil perikanan adalah selisih nilai produk hasil perikanan yang telah melalui proses pengolahan dengan produk hasil perikanan segar</p>	Laporan Hasil Pendataan Produksi kepada Pengolah Hasil Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan

		<p>Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)</p>	$\frac{I_t}{I_b} \times 100$ <p>Keterangan :  a) It = Indeks yang diterima oleh pembudidaya ikan  b) Ib = Indeks yang Indeks yang dibayar/dikeluarkan oleh pembudidaya ikan</p>	Laporan hasil survei NTPi	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi	$f(x) = \sum (\% \text{ AKE tingkat konsumsi} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan})$ <p>Keterangan :  Jumlah Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Tingkat Konsumsi dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan</p>	Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
		Skor PPH Ketersediaan	$f(x) = \sum (\% \text{ AKE tingkat ketersediaan} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan})$ <p>Keterangan :  Jumlah Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Tingkat Ketersediaan dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan</p>	Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	<p>Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada DKPPP</p>	<p>Nilai SAKIP pada DKPPP</p>	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah
Indikator Tujuan	: 1. PDRB Sektor Perdagangan 2. Rasio Kewirausahaan
Tugas	: Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan di Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro dan Perdagangan
Fungsi	: a. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan; dan Perindustrian b. Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan; dan Perindustrian c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan; dan Perindustrian d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Perdagangan dan Perindustrian dan; e. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Koperasi berkualitas adalah Koperasi yang memiliki kinerja aktif dalam bidang kelembagaan, kinerja usaha meningkat dan keuangan sehat serta partisipasi anggota yang kuat.</p> <p>Koperasi Sehat adalah koperasi yang mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya serta memenuhi kewajiban sesuai AD/ART, memenuhi kualifikasi yang baik dalam aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan jati diri.</p>	Data Keragaan Koperasi	Bidang Koperasi
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Aspek Usaha Mikro Yang Mandiri adalah Aspek Legalitas Usaha, Aspek Keuangan (Laporan Keuangan Terpisah), Aspek Pasar (Sebaran Pemasaran mencapai Tingkat Kota), Aspek Pelaku Usaha yang kompeten (Jumlah peserta pelatihan dengan predikat baik)</p>	Data UMKM	Bidang Usaha Mikro

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Peningkatan Nilai Perdagangan	Nilai Perdagangan tahun (n) – Nilai Perdagangan tahun (n-1)	Data Perdagangan	Bidang Perdagangan
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Bappedalitbang	Nilai SAKIP pada Bappedalitbang	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator Tujuan	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tugas	:	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup;</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan hidup;</li><li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Lingkungan Hidup;</li><li>4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan</li><li>5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum_i^n IKA \text{ Titik Pantau}_i}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$ $IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$ dimana, W : Faktor pembobot I : Sub-indeks	Surat dari Kementerian LH tentang Hasil Nilai IKLH Kabupaten/ Kota	1. Kepala Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan (TAPEN) 2. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan (P2KLH)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Perumusan IKU dengan parameter SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , dan PM <sub>2.5</sub> menjadi sebagai berikut: $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata - rata Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2,5}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks PM}_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata PM}_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$	Surat dari Kementerian LH tentang Hasil Nilai IKLH Kabupaten/ Kota	1. Kepala Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan (TAPEN) 2. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan (P2KLH)

2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	<p>Persentase Sampah Tertangani</p> $\frac{\sum \text{Penanganan Sampah} + \sum \text{Pengurangan Sampah}}{\sum \text{Timbulan Sampah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Timbulan Sampah : L/orang atau unit/hari Kota Kecil : 2,5 L/org/hari</p>	Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan di SIPSN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah (P2S)</li> <li>2. Kepala UPTD Pengolahan Sampah (PS)</li> </ol>
3.	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<p><i>IKL = IKTL + Faktor Koreksi Gambut</i></p> $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$ <p>dimana, TL : Tutupan lahan C : Koefisien kelas tutupan lahan</p>	Surat Kementerian LH tentang Hasil Nilai IKLH Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Konservasi dan Pertamanan</li> <li>2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kermitraan Lingkungan (P2KLH)</li> <li>3. Kepala UPTD Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup (IPLH)</li> </ol>
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada DLH	Nilai SAKIP pada DLH	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo
Tujuan	: 1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri 2. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat
Indikator Tujuan	: 1. Nilai Produksi Sektor Industri 2. Persentase PMKS
Tugas	: Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha Industri Daerah, pengelolaan sistem informasi industri nasional, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi
Fungsi	: 1. Perencanaan dan pembangunan industri, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri daerah 2. Pengendalian izin usaha Industri Daerah, meliputi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Daerah; 3. Pengelolaan sistem informasi industri nasional, meliputi Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Daerah; 4. Perencanaan tenaga kerja, meliputi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK); 5. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, meliputi : pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah. 6. Penempatan tenaga kerja, meliputi : pelayanan antar Kerja di Daerah, penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1(Satu) Daerah, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah; dan penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah.

7. Hubungan industrial meliputi : pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah; dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.
8. Perencanaan kawasan transmigrasi, meliputi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
9. Pembangunan kawasan transmigrasi, meliputi penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah; dan
10. Pengembangan kawasan transmigrasi, meliputi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	$\frac{\text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n)} - \text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)}}{\text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)}} \times 100\%$ Penjelasan : Nilai produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari proses produksi, dihitung berdasarkan banyaknya produksi dan harga per unit produksi. Produk yang dinilai mencakup produk yang dijual, disimpan sebagai stok, digunakan sendiri, dan yang diberikan kepada pihak lain (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional : halaman 396).	Data Industri	Bidang Perindustrian
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	$\frac{\sum \text{Pencari Kerja yang Ditempatkan pada Sektor Formal dan Informal}}{\sum \text{Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$	Dokumen Data Ketenagakerjaan	Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja}}{\text{Jumlah total perusahaan}} \times 100\%$ Ket : - Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja adalah perusahaan yang mempunyai PP/PKB/PKWT/SP/SP/LKS Bipartit - Jumlah total perusahaan adalah jumlah seluruh perusahaan di Kota Probolinggo	Data Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama	Bidang Hubungan Industrial

		Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	$\frac{(\text{Jumlah kasus perselisihan hub industrial tahun } n) - (\text{Jumlah kasus perselisihan hub industrial tahun } n-1)}{\text{Jumlah kasus perselisihan hub industrial tahun } n-1} \times 100 \%$ <p>Ket: Kasus perselisihan hubungan industrial adalah kasus perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama ataupun anjuran.</p>	Data perjanjian bersama dan anjuran	Bidang Hubungan Industrial
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP pada Disperinaker	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Disperinaker	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Nilai Investasi Daerah Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1.Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal 2.Nilai SAKIP 3.Indeks Pelayanan Publik
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Fungsi	1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; 2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; 4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; dan 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Nilai penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Pertumbuhan Investasi  $\frac{\text{Nilai Investasi tahun } n - \text{Nilai Investasi tahun } (n-1)}{\text{Nilai Investasi tahun } n1} \times 100\%$ <b>Keterangan :</b>  Nilai investasi sesuai kegiatan penanaman modal	LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Kepala Dinas
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPSTP	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat )	Laporan SKM	Kepala Dinas
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP pada DPMPSTP	Nilai SAKIP pada DPMPSTP	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan	Meningkatnya pemerataan dan pemantapan infrastruktur perkotaan
Indikator Tujuan	: 1. Persentase Ketersediaan Infrastruktur 2. Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan KawasanPermukiman
Fungsi	a. perumusan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan dan memiliki akses sanitasi aman	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Perpipaan	$\frac{\text{Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Perpipaan}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Laporan Standar Pelayanan Minimal	Kepala Bidang Cipta Karya
2.	Meningkatkan cakupan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Laporan Standar Pelayanan Minimal	Kepala Bidang Cipta Karya
3.	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan dan Jembatan Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Panjang Jalan dalam Kondisi mantap adalah kondisi dimana kondisi jalan dengan tingkat kerusakan tidak lebih dari 60% dan tingka kerusakan jalan tidak ada lubang dengan kedalaman lebih dari 20 cm</p>	Data teknis jalan kota	Kepala Bidang Bina Marga
4.	Meningkatkan Pemanfaatan Penataan Ruang Kota Sesuai RTRW	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	$\frac{\text{Luas Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100\%$	Siwastek (Sistem Pengawasan Teknis) Penataan Ruang	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

5.	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Irigasi Kota}} \times 100\%$	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Air	Kepala Bidang Sumber Daya Air
6.	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penurunan luasan permukiman kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh Awal} - \text{Luas Kawasan Kumuh Akhir}}{\text{Luas Kawasan Kumuh Awal}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas Kawasan Kumuh Awal: Luas kawasan kumuh sebelum intervensi (dalam hektar) berdasarkan SK Wali Kota Penetapan Kawasan Kumuh Tahun 2020</li> <li>- Luas Kawasan Kumuh Akhir: Luas kawasan kumuh setelah intervensi (dalam hektar)</li> </ul>	Berpedoman pada Indikator Kinerja Urusan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
		Persentase penyelesaian sengketa	$\frac{\text{Jumlah Sengketa yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sengketa yang Terdaftar}} \times 100\%$	Berpedoman pada Indikator Kinerja Urusan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
7.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas PUPR Perkim	Nilai SAKIP pada Dinas PUPR Perkim	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kademangan 2. Nilai SAKIP
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kademangan	Nilai SAKIP pada Kecamatan Kademangan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kanigaran 2. Nilai SAKIP
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kanigaran	Nilai SAKIP pada Kecamatan Kanigaran	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kedopok 2. Nilai SAKIP
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kedopok	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Kedopok	Nilai SAKIP pada Kecamatan Kedopok	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Mayangan 2. Nilai SAKIP
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Mayangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Mayangan	Nilai SAKIP pada Kecamatan Mayangan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK
Indikator Tujuan	: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Wonoasih 2. Nilai SAKIP
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	Kepala Seksi Pelayanan
					Kepala Seksi Pemerintahan
					Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
					Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Wonoasih	Nilai SAKIP pada Kecamatan Wonoasih	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN